

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi perekonomian Indonesia sekarang ini masih tertinggal dibandingkan negara-negara lainnya. Bahkan sekarang ini Indonesia masih disebut negara berkembang bukan negara maju. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia dan tingkat kemakmuran rakyat yang masih kurang. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang pada maret 2020 dan meningkat 2,76 juta pada September 2019. Untuk mengatasi hal tersebut maka Indonesia membutuhkan orang-orang yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Penciptaan lapangan pekerjaan ini biasanya dengan cara membuka usaha kecil menengah. Usaha yang dibuat tidak harus dalam skala yang besar, tapi bisa dalam skala kecil maupun menengah untuk menyambung hidup. Sekarang ini usaha kecil menengah merupakan usaha yang sangat potensial. Dikarenakan banyak orang yang sukses berkat usaha kecil ataupun menengah. Usaha kecil menengah biasanya lebih diminati karena tidak memerlukan modal yang besar dan belum banyak pesaingnya. Selain itu dalam menjalankan usahanya industri kecil menengah lebih mudah dan sederhana.¹

Usaha kecil menengah merupakan salah satu penopang perekonomian bangsa. Industri kecil menengah adalah salah satu sumber penghasilan negara

¹Siti Nurhayati(2012) Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pengembangan Usaha kecil Menengah di Kota Surakarta. Program Diploma III Manajemen Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

melalui pajak yang dibayarnya. Selain itu untuk meningkatkan penghasilan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat bisa bertambah. Pemulihan ekonomi bertujuan mengembalikan tingkat pertumbuhan yang memadai dan untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan. Sektor industri dan perdagangan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian suatu Negara. UKM dan UMKM memiliki perbedaan yang sangat mendasar UKM adalah usaha kecil menengah sedangkan UMKM adalah usaha mikro kecil menengah atau usaha milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk mewujudkan usaha kecil tersebut Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan fungsinya yaitu melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Manggarai Timur.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur mempunyai Tugas dan Fungsi.²

1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dinas menyelenggarakan fungsi:

²Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Timur

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang perindustrian
- b. peningkatan pertumbuhan omset koperasi simpan pinjam
- c. peningkatan pertumbuhan usaha mikro
- d. peningkatan sektor perdagangan
- e. peningkatan sektor industry
- f. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perdagangan koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang perindustrian
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang perindustrian
- h. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang perdangan koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sektor UKM mempunyai peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun dibalik peran UKM yang penting ini, ternyata masih menyimpan segudang permasalahan yang sangat mendasar. UKM masih lemah dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas, serta lemahnya dalam kemampuan manajemen keuangan.

Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari 9 Kecamatan dan 159 desa dan 17 kelurahan. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 UKM meningkat dari 1403 menjadi 3572. Jumlah ini cukup banyak dan menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Namun demikian penyebaran lokasi UKM tersebut tidak merata di setiap daerah, sebagian besar usaha kecil berada di wilayah Kecamatan Borong.³ Untuk Jumlah UKM di Kecamatan Borong dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah UKM di Kecamatan Borong Tahun 2018 - 2020

| No | Tahun | Jumlah UKM | Ket |
|----|-------|------------|-----|
| 1 | 2018 | 127 usaha | |
| 2 | 2019 | 128 usaha | |
| 3 | 2020 | 36 usaha | |

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Timur

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada Tahun 2020 untuk jumlah usaha kecil dan menengah sangat rendah yaitu 36 usaha. Hal ini berbanding jauh sekali dengan Tahun 2018 dan 2019, dimana terjadi peningkatan jumlah UKM dari tahun ke tahun. Tentu saja ini berpotensi mengurangi jumlah pengangguran.

Dengan jumlah yang ada, penulis menduga adapun permasalahan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada Kecamatan Borong dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu internal dan eksternal.

³Sumber Data Dinas Perdagangan , Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Timur

Faktor internal terbagi atas:

a. Terbatasnya modal

Terbatasnya jumlah modal merupakan kendala utama dalam pengembangan UKM Kabupaten Manggarai Timur. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya merupakan usaha perorangan dan menggunakan modal sendiri.

b. Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat mempengaruhi perkembangan UKM.

Faktor eksternal terbagi atas:

a. Infra struktur/ sarana prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana serta infrastuktur menyebabkan UKM tidak berkembang sebagaimana diharapkan.

b. Pandemi Virus Corona

Pandemi Virus Corona bukan hanya sekedar bencana kesehatan, virus yang dikenal sebagai Covid-19 ini telah menimbulkan kekacauan diberbagai sektor.

Keberadaan usaha kecil dan menengah (UKM) terbukti merupakan penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ditengah ancaman krisis ekonomi akibat pandemic covid-19 ini, maka penguatan basis UKM harus dilakukan guna menopang perekonomian rakyat serta dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah sejauh ini sangat serius melakukan hal itu. Selain itu,

pandemic COVID-19 memberikan dampak luar biasa pada aspek sosial politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sangat dibutuhkan Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk menumbuhkan gairah usaha dari UKM.

Dalam hal ini yang paling berperan adalah Dinas Perdagangan (DISPERINDAG) sebagai salah satu pendorong usaha kecil menengah untuk lebih maju dan berkembang. UKM memiliki peran yang strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan maupun masyarakat lokal, terutama di masa pandemi covid 19.

Dengan melihat latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha kecil menengah Pada Masa Pandemi Di Kecamatan Borong.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas, masalah pokok yang dirumuskan oleh penulis dalam tulisan ini adalah “ Bagaimana Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha kecil menengah pada masa pandemi di Kecamatan Borong ” ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha kecil menengah pada masa pandemi di Kecamatan Borong.

1. 4 Kegunaan Penelitian

A. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha kecil menengah pada masa pandemi bagi Universitas Katholik Widya Mandira Kupang dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan.

B. Manfaat Praktis

- 1). Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- 2). Agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mengetahui Peran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.